

**KADERISASI PARTAI POLITIK DALAM PEMENUHAN KUOTA
PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF KABUPATEN PONOROGO**

(studi kasus di Partai GOLKAR dan PKB kabupaten Ponorogo)



Oleh :

IMAM SHOARI

NIM : 13221183

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2017

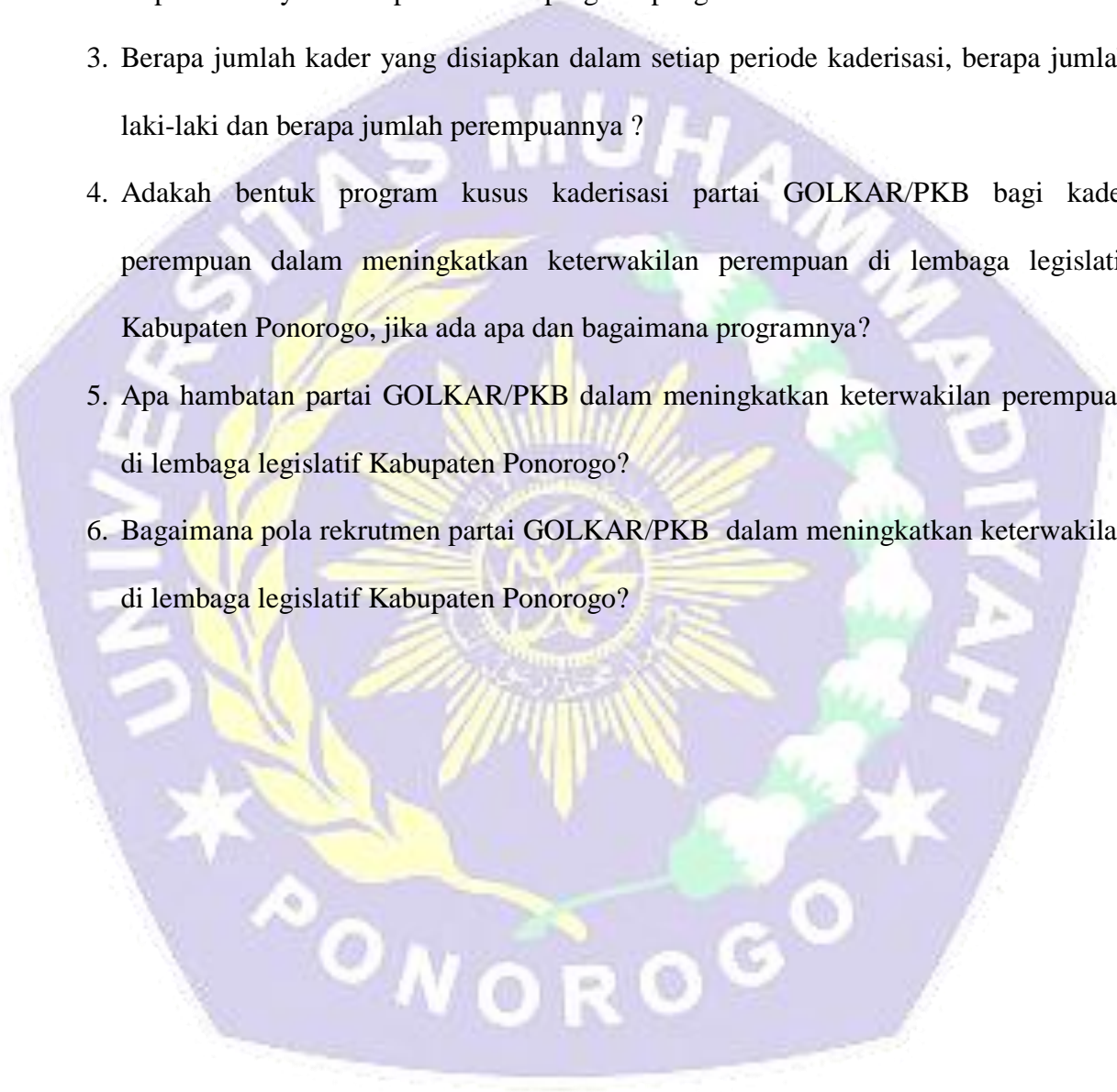
LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 daftar pertanyaan wawancara

Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana bentuk program kaderisasi partai GOLKAR/PKB dalam meningkatkan keterwakilan anggota di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo?
2. Kapan biasanya waktu pelaksanaan program pengkaderan itu dilaksanakan?
3. Berapa jumlah kader yang disiapkan dalam setiap periode kaderisasi, berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuannya ?
4. Adakah bentuk program khusus kaderisasi partai GOLKAR/PKB bagi kader perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo, jika ada apa dan bagaimana programnya?
5. Apa hambatan partai GOLKAR/PKB dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo?
6. Bagaimana pola rekrutmen partai GOLKAR/PKB dalam meningkatkan keterwakilan di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo?



Lampiran 2 foto kantor PKB dan GOLKAR



Lampiran 3 foto wawancara dengan anggota DPRD Ponorogo



Lampiran 4 surat izin penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 1650 / 405.19 / 2016

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 11 November 2016, Nomor : 573/III-2/PN/2016, perihal Permohonan Ijin Konfirmasi Data.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **IMAM SHOBARI**
Mhs. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat : Dukuh Tengah RT. 001 RW. 001 Kel/Desa Karanglo Kidul
Kec. Jambon Kab. Ponorogo
Thema / Acara Survey / Research / PKL/ Pengumpulan data/Magang : " Pola Kaderisasi Partai Politik Dalam Pemenuhan Kuota Perempuan Dalam Legislatif Kabupaten Ponorogo"
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : 1. Kantor Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Ponorogo
2. Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Ponorogo
3. Kantor Partai Golkar Kab. Ponorogo
Tujuan Penelitian : Mata Kuliah
Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 2 (Dua) Bulan Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan.
Bidang Penelitian : Ilmu Pemerintahan
Status Penelitian : Baru
Anggota Peneliti : -
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Drs. JUSUF HARSONO, M.Si.**
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNMUH Ponorogo
Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 14 November 2016

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PONOROGO



Drs. H. MURDJANTO, M.Si.

Tembusan :

Lampiran 5 surat keterangan melakukan penelitian dari PKB



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1083/DPC-03/IV/B.2/1/2017

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Ponorogo :

Nama : Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si
Jabatan : Sekretaris DPC PKB Ponorogo

Dengan ini menerangkan :

Nama : Imam Shobari
NIM : 13221183
Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Telah melakukan penelitian masalah ***Pola Kaderisasi Partai Politik Dalam Pemenuhan Kuota Perempuan dalam Legislatif Kabupaten Ponorogo***

Demikian Surat Keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallaah al-Muwaffiq Ilaa Aqdam al-Thariq
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh

Ponorogo, 02 Januari 2017



Dwi Agus Prayitno, SH.M.Si
Sekretaris

Lampiran 6 surat keterangan melakukan penelitian dari GOLKAR



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman 66 Telp./Fax. (0352) 481851 Ponorogo

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-03/DPD-II/P.GOLKAR/I/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Ponorogo :

Nama : Drs. AHMAD FAUZI
Jabatan : Wakil Sekretaris DPD Partai GOLKAR Ponorogo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IMAM SHOBARI
NIM : 13221183
Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Telah melakukan penelitian masalah Pola Kaderisasi Partai Politik dalam pemenuhan kuota perempuan dalam Legislatif Kabupaten Ponorogo

Demikian surat keterangan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 Januari 2017

DPD PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN PONOROGO

Wakil Sekretaris
**DEWAN PIMPINAN
PARTAI
GOLONGAN
KARYA**
DR. AHMAD FAUZI

Lampiran 7: Hasil wawancara dengan partai Golkar

1. Bagaimana bentuk program kaderisasi partai GOLKAR dalam meningkatkan keterwakilan anggota di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo?

a. Bapak joko susilo

“ bentuk program kaderisasi partai golkar dilakukan dengan mengadakan diklat pendidikan dan pelatihan terhadap kader partai mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, pelatihan ini sudah ada agenda dari pusat yaitu diklat KARAKTERDES, diklat ini adalah pendidikan dan pelatihan kader penggerak teritorial desa”.

b. bapak Ahmad fauzi

“ Kaderisasi dalam partai golkar itu namanya KARAKTERDES, pelatihan kader penggerak teritorial desa, program ini tidak hanya ditingkat kabupaten tapi sampai tingkat pusat karena program ini sudah diagendakan oleh pengurus partai tingkat pusat.”

2. Kapan biasanya waktu pelaksanaan program pengkaderan itu dilaksanakan?

a. Bapak Joko susilo

“ Diklat ini kalau diponorogo diadakan setelah musda mas, 5 tahun sekali, biasanya semua sudah disiapkan dari pusat mulai dari materi, buku panduan dan semuanya”.

b. Bapak Ahmad fauzi

“ Semuanya sama mas dari tingkat pusat sampai bawah diadakan setelah musyarah partai, kalau diponorogo MUSDA kalau di tingkat pusat ya MUNAS”.

3. Adakah bentuk program khusus kaderisasi partai GOLKAR bagi kader perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo, jika ada apa dan bagaimana programnya?

a. Bapak Joko susilo

“ Kalau diklat gak ada mas, ya jadi satu itu, tapi kalau untuk meningkatkan perempuan dalam golkar kami ada organisasi sayap mas, IIPG, ikatan istri partai golkar dan HWK himpunan wanita karya”.

b. bapak Ahmad fauzi

“ Untuk mengkader kusus perempuan itu kita membentuk organisasi IIPG, ikatan istri partai golkar, ya dari organisasi ini kita menciptakan kader-kader kusus perempuan”.

4. Apa hambatan partai GOLKAR dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo?

a. Bapak Joko susilo

“ Kalau dari partai tidak ada mas, kami bisa menyediakan minimal sesuai dengan aturan, karena itu memang harus dipenuhi oleh setiap partai sesuai undang-undang bahkan untuk partai Golkar selalu menyiapkan lebih dari aturan tiga puluh persen itu, tapi biasanya perempuan itu takut mas untuk masuk kedalam dunia politik, enggak tahu kenapa mungkin karena menganggap dunia politik itu keras atau bagaimana, kemudian kendala dilarang oleh keluarganya perempuan itu, entah orang tuanya atau suaminya dan tentunya masalah dana ini yang paling ditakuti perempuan mas, karena memang dalam politik itu perlu pengorbanan tidak hanya tenaga dan waktu tapi juga materi, atau uang”.

b. Bapak Ahmad fauzi

“ Tidak ada mas, kalau partai tidak ada kendala, kalau dari kaum perempuannya masalah biaya mas, yang jelas uang itu yang paling utama mas tidak mungkin kalau ditingkat kabupaten seperti ini bisa menang tanpa uang, semakin banyak uang semakin besar kesempatan menang sudah itu yang utama, kalau punya banyak uang beres ”.

5. Bagaimana pola rekrutmen partai GOLKAR dalam meningkatkan keterwakilan di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo?

a. Bapak Joko susilo

“ Terbuka untuk umum mas tidak hanya dari pengurus partai, bisa dari tokoh masyarakat bisa dari kepala desa macam-macam, contohnya pak Andri catur yang sekarang menjabat DPRD Ponorogo dari partai GOLKAR ini bukan kader partai, beliau dulu nyalon lurah tidak jadi kemudian daftar calon DPRD malah jadi, ya seperti itu”.

b. Bapak Ahmad fauzi

“ sistemnya terbuka untuk umum tidak hanya dari kader partai saja, kita cari dari kader terlebih dahulu siapa yang mampu kalau masih belum cukup kita cari orang lain, karena untuk nyaleg itu biayanya besar mas, enggak mungkin kalau partai mau bayari misalnya seratus juta per orang, untuk dana kampanye partai uangnya dari mana, makanya kita cari yang mampu dari segi biaya juga”.



Lampiran 7 : Hasil wawancara dengan partai PKB

1. Bagaimana bentuk program kaderisasi partai PKB dalam meningkatkan keterwakilan anggota di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo?

a. Dwi Agus Prayitno

“ Dalam partai PKB ada tingkatan pengkaderan mas, ada PKP, PKM, PKA. PKP itu pendidikan kader pertama ini untuk tingkat kabupaten, PKM itu kader menengah untuk tingkat provinsi kalau PKA itu kader atas untuk tingkat nasional, kalau di Ponorogo ini PKP mas, PKP ini ada dua satu PKP mandiri ini semua yang menentukan adalah pengurus kabupaten sendiri dan ada PKP yang dari pusat ini semua yang menentukan pusat, kalau sementara ini Ponorogo yang mandiri”.

b. Binti Akhlaqil Mukaromah

“ Pengkaderan dalam partai PKB itu berjenjang mas, karena sekarang itu menggunakan sistem BTS, yaitu berjenjang terstruktur dan sistematis. Itu ada tingkatan-tingkatannya mulai dari tingkat cabang sampai pusat kalau dicabang itu ada ada PKP pendidikan kader pertama, di wilayah itu ada PKM dan untuk pusat itu ada PKA. Kalau di Ponorogo ya PKP, tapi tidak hanya itu di Ponorogo juga ada pengkaderan tingkat anak cabang itu tingkat wilayah itu yang mengadakan pengurus partai tingkat cabang.”

2. Kapan biasanya waktu pelaksanaan program pengkaderan itu dilaksanakan?

a. Dwi Agus Prayitno

“ Pelaksanaannya itu setelah muscab tapi tidak hanya 5 tahun sekali seperti muscab karena kami juga mengagendakan pengkaderan PKP itu untuk tiap wilayah kecamatan, dan itu bergantian misalnya dalam agenda tahun ini diadakan di kecamatan A, tahun berikutnya ganti ke kecamatan B dan seterusnya”.

b. Binti Akhlaqil Mukaromah

“ Pelaksanaanya setelah muscab, itu yang pengkaderan tingkat kabupaten yang pesertanya perwakilan dari pengurus tingkat kecamatan atau anak cabang, tapi juga ada pengkaderan untuk tingkat anak cabang yang dikader itu dari pengurus ranting dan anak ranting, itu diagendakan secara bergantian dari anak cabang Ngrayun misalnya, kemudian Slahung dan seterusnya”.

3. Adakah bentuk program kusus kaderisasi partai PKB bagi kader perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo, jika ada apa dan bagaimana programnya?

a. Dwi Agus Prayitno

“ Tidak ada, pengkaderan ini bukan hanya untuk laki-laki tapi untuk perempuan juga kalau untuk meningkatkan kader perempuan kami ada Perempuan bangsa ini badan otonom kusus perempuan, kalau untuk pemuda kami ada garda bangsa”.

b. Binti Akhlaqil Mukaromah

“ Untuk pengkaderan ini sifatnya umum bukan kusus laki-laki tapi untuk meningkat keterwakilan perempuan kami punya badan otonom kusus untuk perempuan yaitu Perempuan Bangsa, dari situ kita mengkader kaum perempuan”.

4. Apa hambatan partai PKB dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo?

a. Dwi Agus Prayitno

“ Tidak ada, kami bisa memenuhi aturan yang ada mulai dari pengurus dari tingkat anak cabang kami semua ada perempuannya, kalau sekarang di PKB tidak ada perwakilan dari kaum perempuan dalam kursi legislatif itu dari masyarakatnya kenapa tidak memilih yang perempuan, kan kami sudah menyiapkan “.

b. Binti Akhlaqil Mukaromah

“ Tidak ada mas kalau dari partai, tapi untuk masalah keterwakilan itu kan yang menentukan pilihan masyarakat partai bisanya hanya menyediakan untuk masalah hasil kan tergantung pilihan dari masyarakat”.

5. Bagaimana pola rekrutmen partai PKB dalam meningkatkan keterwakilan di lembaga legislatif Kabupaten Ponorogo?

a. Dwi Agus Prayitno

“ Kalau dalam masalah rekrutmen sistemnya terbuka, jadi tidak hanya untuk para kader dan pengurus partai PKB tetapi juga dibuka untuk umum, karena kadang ada kader dari organisasi NU atau tokoh masyarakat yang dianggap partai mempunyai masa yang lebih banyak dari pada kader partai”.

b. Binti Akhlaqil Mukaromah

“ Dalam rekrutmen untuk calon legislatif kami menggunakan sistem terbuka jadi bisa untuk umum mas tidak hanya dari kader partai, tetapi ada beberapa tahapan dalam penentuan calon legislatif, dan kita jauh sebelum pileg digelar kami sudah mengadakan seleksi untuk paca calon legislatif”.

